

SISTEM INFORMASI PERIZINAN DAN PERMOHONAN REKOMENDASI (STUDI KASUS: DINAS PARIWISATA KOTA SAMARINDA)

Achmad Syaeful^{1*}, Andi Tejawati², Ummul Hairah³

^{1,2,3}Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Mulawarman
Jl. Panajam Kampus Gunung Kelua, Universitas Mulawarman, Samarinda 75119 - Kalimantan Timur
Email : achmadsyaeful@gmail.com, anditejawati117@yahoo.com, Ummihairah@gmail.com

ABSTRAK

Tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang baik dan memuaskan masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dinas Pariwisata Kota Samarinda salah satu instansi pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan permohonan rekomendasi perizinan meliputi : Izin Mendirikan bangunan, Surat Izin Tempat Usaha, Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dinilai belum efektif dan efisien karena prosesnya masih dilakukan secara manual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi perizinan dan permohonan rekomendasi perizinan di Dinas Pariwisata Kota Samarinda berbasis web agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Dikembangkan dengan metode waterfall dan pemodelan analisis terstruktur, sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman php dan MySQL. Sistem akan diuji dengan metode black box dan analisis hasil penelitian dengan kuesioner. Hasil penelitian ini adalah sistem yang dapat memudahkan pemohon mendapatkan informasi terkait permohonan, pengajuan permohonan, dan pemantauan status berkas permohonan. Disamping itu pegawai dapat mengelola data permohonan yang diajukan oleh pemohon secara cepat dan transparan.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Perizinan, Teknologi Informasi, Sistem Informasi

1. PENDAHULUAN

Tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang baik dan memuaskan kepada masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah harus dapat mengubah pelayanan publik yang buruk menjadi lebih baik. Potret buruknya pelayanan publik seperti ketidakpastian pelayanan, tidak adanya standar pelayanan yang jelas dan mudah dipahami membuat masyarakat memiliki posisi yang lemah ketika berhadapan dengan penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, prosedur yang panjang dan waktu yang lama dalam proses pelayanan publik juga menjadi permasalahan publik yang sering terjadi.

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat juga dinilai belum efektif dan efisien. Untuk dapat mengakses pelayanan, masyarakat harus datang ke suatu instansi pemerintah tertentu. Hal ini tentunya membuat pelayanan membutuhkan waktu yang lama dan tentunya biaya yang besar. Dengan pelayanan yang masih mengandalkan tatap muka ini juga menjadikan masyarakat harus datang ke instansi lebih dari satu kali ketika syarat dan prosedur belum lengkap.

Salah satu pelayanan publik yang paling sering diakses oleh masyarakat adalah pelayanan perizinan. Seperti yang diketahui bahwa kehidupan masyarakat tidak akan terlepas dari perizinan. Perizinan dibutuhkan ketika akan mendirikan bangunan, usaha dagang, minimarket, praktik

dokter, praktik bidan, apotek dan masih banyak jenis perizinan yang lain..

Semakin majunya perkembangan zaman yang syarat dengan pemanfaatan teknologi informasi seharusnya dapat menjadi solusi dalam masalah pelayanan publik yang ada. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih cepat, transparan sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi perlu diterapkan untuk mengurangi resiko terjadinya diskriminasi dalam memberikan pelayanan, ketidakpastian mengenai waktu ataupun biaya pelayanan dan tentunya mengurangi pungutan liar yang sering terjadi.

Mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government”, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib memiliki Sistem Informasi dalam pelaksanaan tugas pokok, dan fungsinya. Dinas Pariwisata Kota Samarinda adalah salah satu instansi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan permohonan rekomendasi perizinan meliputi : Izin Mendirikan bangunan, Surat Izin Tempat Usaha, Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Memerlukan sebuah sistem informasi sebagai suatu inisiatif dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien untuk mengatasi permasalahan dalam pelayanan yang selama ini berjalan secara manual.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis (Jogiyanto,2005) adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.[6]

2.2 Website

Website atau disingkat web adalah sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk digital baik itu teks, gambar, animasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga dapat diakses dari seluruh dunia. (Hidayat Deddy,2010)

2.3 Penelitian Relevan

Penelitian oleh Wahyu Ari Kurniawan, 2011. Dengan judul “Pengembangan Aplikasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan)”. Penelitian ini bertujuan untuk membantu proses perijinan berkaitan izin mendirikan bangunan. Aplikasi ini ini dibuat agar dapat menghindari kesalahan perhitungan, mempermudah dalam membuat laporan-laporan karena terformat, memudahkan petugas dalam mendata semua data permohonan imb, Perijinan terkomputerisasi dan terintegrasikan antar bidang, dapat mengetahui posisi keberadaan proses ijin mendirikan bangunan.

Penelitian oleh Eva Kurniawaty, 2012. Dengan judul “Sistem Informasi Perijinan Online Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Surabaya”. Penelitian ini bertujuan menyediakan sistem informasi pelayanan perijinan Disperindag secara komputerisasi, menyediakan laporan statistik perijinan di Disperindag, menggantikan proses perijinan manual, form dan laporan sesuai dengan dinas terkait, dan sistem dapat memonitoring alur perijinan, dan merancang databases untuk menyimpan data perizinan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Penelitian

Observasi di Instansi Dinas Pariwisata Kota Samarinda. Dari hasil observasi, penulis mendapatkan fakta-fakta di lapangan (Dinas Pariwisata Kota Samarinda) mengenai kondisi (proses permohonan rekomendasi perizinan) dan tahap-tahap untuk mengurus permohonan. Selain melakukan observasi, penulis juga melakukan pengambilan data berupa data berupa form permohonan rekomendasi dan surat keterangan rekomendasi.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Berikut ini adalah kebutuhan

fungsional pada sistem pelayanan publik untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha di Dinas Pariwisata Kota Samarinda.

Berikut Adalah Kebutuhan fungsional pada sistem informasi perizinan dan permohonan rekomendasi perizinan:

1. Admin

- mengelola informasi perizinan pendaftaran permohonan rekomendasi,
- mengelola data perizinan dan jenis usah
- mengelola data pegawai sesuai dengan bidang dan hak aksesnya.

2. Pegawai

- Menverifikasi data pemohon (kesekretariatan)
- Menverifikasi data permohonan rekomendasi perizinan.(penerima berkas)
- Mengelola penomoran surat masuk dan keluar.(kesekretariatan, dan penerima berkas)
- Mengelola data peninjauan lapangan.

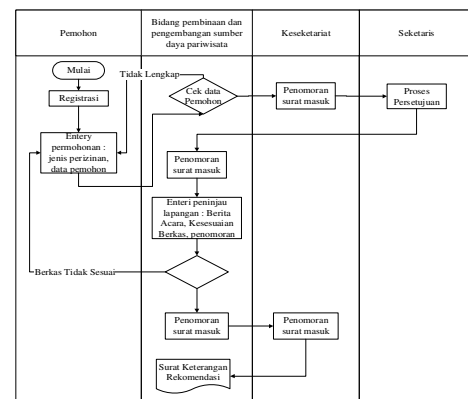
3. Pemohon

- Melakukan pendaftaran.
- Mengelola data pemohon,
- Menginputkan data permohonan rekomendasi perizinan (login sistem)
- Melihat alur tindak lanjut permohonan yang telah diinputkan
- Dapat mengajukan kembali permohonan yang ditolak.

3.3 Model Desain Sistem

1. Flow Of Document

Pada FOD yang diusulkan ini, digambarkan bahwa pemohon dalam hal ini diasumsikan adalah pengakses web yang yang ingin mengajukan permohonan rekomendasi pada Sistem Informasi Perizinan dan Permohonan Rekomendasi Perizinan.

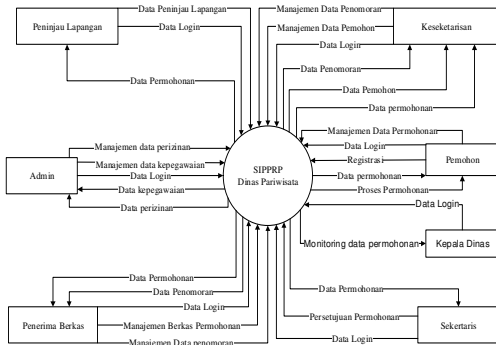


Gambar 1. Flow of Document

2. Diagram Konteks

Pada Diagram Konteks ini terdapat 7 entitas yaitu admin, penerima berkas, peninjau lapangan, kesekretariat, kepala dinas, sekretaris, dan pemohon. Admin dapat memanajemen data kepegawaian, manajemen data perizinan. Penerima berkas permohonan menverifikasi berkas permohonan dan manajemen data penomoran surat masuk dan keluar sebagai arsip bindang. Peninjau lapangan

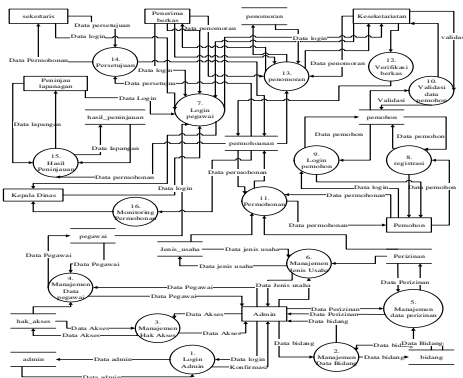
mengelola data survai lapangan, kesekretariatan memajemen data pemohon dan manajemen data penomoran surat masuk dan keluar sebagai arsip dinas. Seketaris menginputkan data persetujuan. Kepada Dinas memonitoring seluruh data permohonan rekomendasi yang masuk ke sistem. Pemohon menginput data registrasi dan mememanajemen data permohonan.



Gambar 2. Diagram Konteks

3. Data Flow Diagram Level 1

DFD Level 1 merupakan representasi dari Diagram Konteks untuk memberikan penjelasan lebih detail. Pada DFD level 1 terdapat 16 proses yaitu : login (pemohon, pegawai, dan admin), manajemen data bidang, manajemen data hak akses, Manajemen Data Pegawai, Manajemen Data Perizinan, Manajemen Jenis Usaha, Registrasi Pemohon, Validasi Data Pemohon, Permohonan Rekomendasi, Verifikasi Berkas Permohonan, Manajemen penomoran, Validasi Permohonan Rekomendasi, Hasil Peninjau Lapangan, Monitoring Permohonan.



Gambar 3. Data Flow Diagram Level 1

3.4 Desain Databases

1 Entity Relational Diagram (ERD)

Pada Entity Relational Diagram terdapat 8 entity yaitu : admin, bidang, hak_kases, pegawai, perizinan, jenis_usaha, pemohon, dan berita acara, serta penomoran.



Gambar 4. Entity Relational Diagram

3.5 Implementasi Sistem

1. Penggunaan Sistem Untuk Admin

Berikut ini adalah menu-menu yang dapat digunakan untuk admin:

a. Login

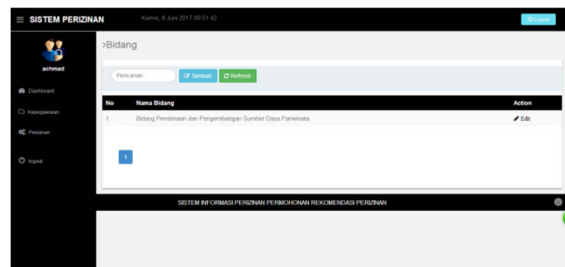
Halaman ini adalah halaman untuk admin pemohon, dan pegawai. Pengguna harus menginputkan username dan password agar dapat mengakses menu utama admin.



Gambar 5. Login

b. Menu Bidang

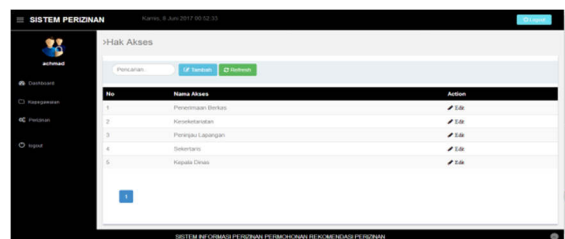
Halaman ini adalah halaman mengelola data bidang yang menangani perizinan di dinas pariwisata kota samarinda.



Gambar 6. Menu Bidang

c. Menu Hak Akses

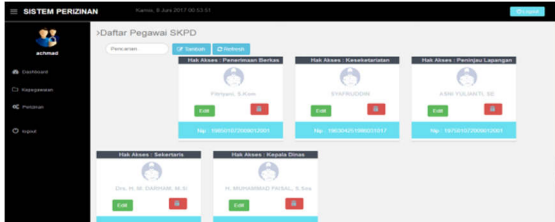
Halaman ini adalah halaman mengelola data hak akses pegawai yang menangani perizinan di dinas pariwisata kota samarinda.



Gambar 7. Menu Hak Akses

d. Menu Pegawai

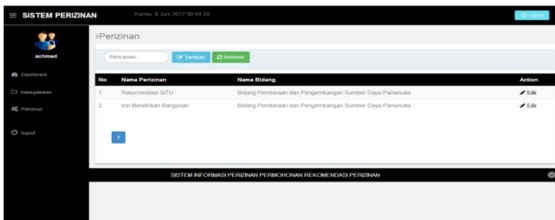
Halaman ini adalah halaman mengelola data pegawai dinas pariwisata yang bertugas menangani perizinan. pada halaman ini akan menampilkan data pegawai yaitu, hak akses, nama pegawai, nip pegawai, dan dilengkapi operation tambah, edit dan hapus.



Gambar 8. Menu Pegawai

e. Menu Perizinan

Halaman ini adalah halaman mengelola data perizinan dinas pariwisata yang bertugas menangani perizinan. pada halaman ini akan menampilkan data perizinan yaitu, nama perizinan, nama bidang, dan dilengkapi operation tambah dan edit.



Gambar 9. Menu Perizinan

2. Penggunaan Sistem Informasi

Berikut ini adalah menu-menu yang dirancang sebagai sistem informasi untuk pemohon :

a. Dinas Pariwisata

Halaman ini adalah halaman informasi tentang visi misi dan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Samarinda.



Gambar 10. Dinas Pariwisata

b. Alur Permohonan

Pada halaman ini terdapat beberapa menu yang tujuannya membantu para pemohon agar dapat mengetahui informasi berkaitan dengan perizinan yaitu alur perizinan



Gambar 11. Alur Permohonan

c. Persyaratan Perizinan

Halaman ini adalah halaman informasi tentang persyaratan yang harus dilengkapi sebelum mengajukan permohonan.



Gambar 12. Persyaratan Perizinan

3. Penggunaan sistem untuk SIPPRP

Berikut ini adalah tahapan-tahapan dari pemohon melakukan registrasi sampai terbit rekomendasi.

a. Menu Registrasi

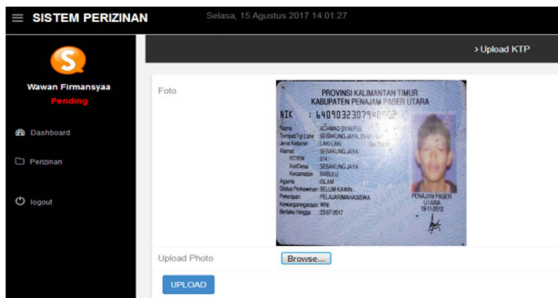
Halaman ini adalah pemohon menginputkan nomor induk kependudukan, nama, pekerjaan, alamat tinggal, password, email, dan no hp.



Gambar 13. Menu Registrasi

b. Upload KTP

Halaman ini adalah halaman upload KTP yang digunakan untuk memverifikasi akun pemohon yang telah melakukan registrasi.



Gambar 14. Upload KTP

c. Verifikasi Data Pemohon

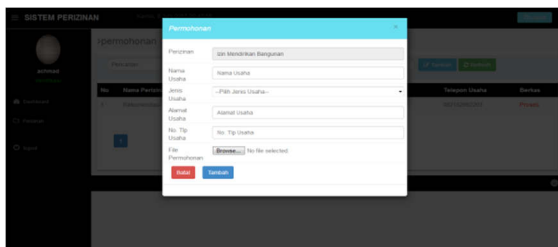
Pada halaman ini akan menampilkan data pemohon yang sudah registrasi yaitu, NIK pemohon, nama pemohon, pekerjaan pemohon, alamat pemohon, telepon pemohon, dan dilengkapi operation verifikasi.



Gambar 15. Verifikasi Data Pemohon

d. Pengajuan Permohonan

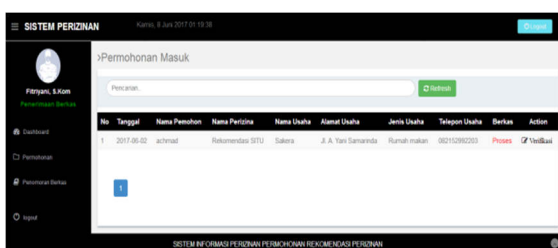
Halaman ini adalah halaman menu ajukan permohonan setelah data pemohon dinyatakan valid data. Pada halaman ini akan menampilkan form untuk mengajukan permohonan.



Gambar 16. Pengajuan Permohonan

e. Menu Verifikasi Berkas Permohonan

Pada halaman ini akan menampilkan data permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu, nama perizinan, nama usaha, jenis usaha, alamat usaha, telepon usaha, dan dilengkapi operation Verifikasi.



Gambar 17. Menu Verifikasi Berkas Permohonan

f. Penomoran Surat Masuk dan Keluar

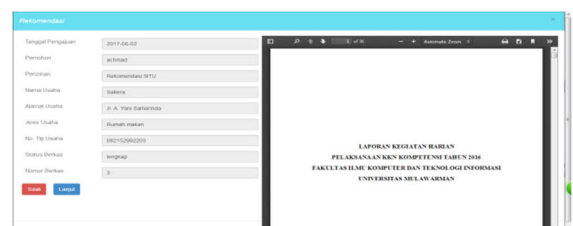
Pada halaman ini akan menampilkan data permohonan yang telah mendapatkan surat masuk dari kesekretariatan dan persetujuan dari sekretaris. Data yang ditampilkan, nama perizinan, nama usaha, jenis usaha, alamat usaha, telepon usaha, dan dilengkapi operation Beri Nomor.



Gambar 18. Penomoran Surat Masuk dan Keluar

g. Verifikasi Tindak Lanjut Persetujuan

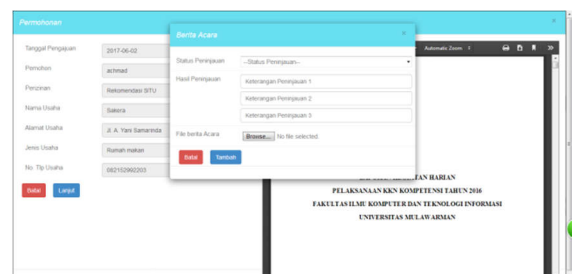
Pada halaman ini akan menampilkan data permohonan yang diajukan oleh pemohon yang telah melewati beberapa tahap verifikasi, penomoran, dan persetujuan. Data yang ditampilkan yaitu, nama perizinan, nama usaha, jenis usaha, alamat usaha, telepon usaha, dan dilengkapi operation persetujuan.



Gambar 19. Verifikasi Tindak Lanjut

h. Berita Acara

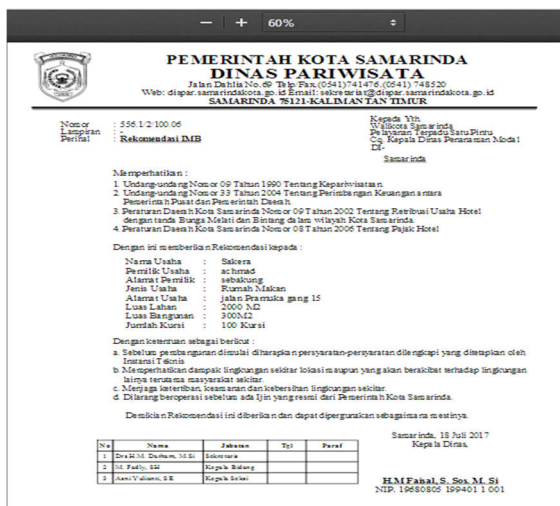
Pada halaman ini akan menampilkan data permohonan yang diajukan oleh pemohon yang telah melewati beberapa tahap verifikasi, penomoran, dan persetujuan. Data yang ditampilkan yaitu, nama perizinan, nama usaha, jenis usaha, alamat usaha, telepon usaha, dan dilengkapi operation berita acara.



Gambar 20. Berita Acara

i. Cetak Surat Rekomendasi

Pada halaman ini akan menampilkan data surat rekomendasi yang sudah disetujui dari tim peninjau lapangan dan mendapatkan nomor surat keluar dari kesekretariatan.



Gambar 21. Surat Rekomendasi (Peninjau Lapangan)

3.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil, analisa dan implementasi, web Sistem Informasi Perizinan dan Permohonan Rekomendasi Perizinan Dinas Pariwisata Kota Samarinda telah sesuai dengan tujuan penulis. Dengan adanya sistem informasi perizinan dan permohonan rekomendasi perizinan membantu masyarakat dalam mencari informasi tentang alur permohonan, persyaratan, dan pengajuan.

Mempercepat pengajuan permohonan rekomendasi dengan adanya sistem yang terkomputerisasi sehingga pemohon hanya perlu mengakses web SIPPRP Dinas Pariwisata Kota Samarinda kemudian menginputkan data permohonan rekomendasi dan mempercepat dinas pariwisata kota samarinda menindak lanjut permohonan yang diajukan pemohon.

Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengajukan permohonan dan mempermudah pemohon untuk pengajuan permohonan rekomendasi melalui web SIPPRP Dinas Pariwisata Kota Samarinda yang selama ini dilakukan secara manual, masyarakat harus datang ke dinas pariwisata kota samarinda untuk mendapatkan informasi tentang persyaratan dan tahapan untuk mengajukan permohonan.

Transparan dalam menindak lanjut permohonan yang diajukan oleh pemohon, karena pemohon dapat memonitoring setiap proses seperti melihat berkas telah diverifikasi, berkas akan ditinjau, dan berkas yang sudah diterbitkan.

Hasil dari tahapan pengujian dan implementasi sistem yang dibangun dapat berjalan dan sesuai dengan hasil yang diharapkan sehingga Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membangun Sistem Informasi Perizinan dan Permohonan Rekomendasi Perizinan Dinas Pariwisata Kota Samarinda.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembuatan Sistem Informasi Perizinan dan Permohonan Rekomendasi

Perizinan Dinas Pariwisata Kota Samarinda maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mempercepat pengajuan permohonan rekomendasi dengan mengakses web SIPPRP Dinas Pariwisata Kota Samarinda.
2. Memudahkan pemohon untuk mendapatkan informasi tahapan dan persyaratan untuk mengajukan permohonan rekomendasi dengan mengakses web SIPPRP Dinas Pariwisata Kota Samarinda.
3. Transparan dalam menindak lanjut permohonan yang diajukan pemohon, pemohon dapat memonitoring tindak lanjut dari Dinas Pariwisata Kota Samarinda.
4. Membantu Dinas Pariwisata dalam mengolah data perizinan, untuk mengurangi kesalahan data perizinan yang diajukan pemohon.

4.2 Saran

Sistem ini tentu saja masih belum sempurna. Masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sistem ini agar menjadi lebih baik lagi. Antara lain:

1. Dapat dikembangkan dan diterapkan sebagai sistem informasi perizinan (IMB, SITU, dan TDUP) yang dapat berguna dalam pengembangan Kota Samarinda Menuju Kota Smart City.
2. Jika nanti Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki SI Perizinan untuk mengajukan permohonan perizinan secara online diharapkan dapat tersinkronisasi dalam mengajukan Perizinan.
3. Sistem informasi penolakan dapat dikembangkan melalui SMS Gateway.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Alfian Noor, Haeruddin, Rudiman. 2017. Sistem Informasi Geografis Manajemen Data Kependudukan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Berbasis Website. Prosiding 2nd SAKTI
- [2]. Dewa, Jefri. 2011. Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik. Kendari: Unhalu Press.
- [3]. Havaluddin. 2009. Memahami Penggunaan Diagram Arus Data; Jurnal INFORMATIKA Mulawarman, September 2009, Vol. 4, No. 3, ISSN: 1858-4853
- [4]. Havaluddin, Agus Tri Haryono, Dwi Rahmawati. 2016. Aplikasi Program PHP dan MySQL. Mulawarman University Press. ISBN: 978-602-6834-22-5
- [5]. Indrajit, Richardus Eko. 2004. Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi.
- [6]. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. Hukum Administrasi Negara

- dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa.
- [7]. Jogiyanto, Hartono. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi, Edisi III. Yogyakarta: ANDI.
- [8]. Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
- [9]. Kurniawaty, Eva. 2012. Sistem Informasi Perijinan Online Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya: Teknik Informatika.
- [10]. Kurniawan, Wahyu Ari. 2012. Pengembangan Aplikasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan), Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Sains dan Teknologi.
- [11]. Ladjamudin, bin Albahra. 2005. Analisis dan Design Sistem Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [12]. Mulyanto, Agus. 2009. Sistem Informasi Konsep & Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [13]. Oetomo, Budi Sutedjo Dharma, S.Kom., MM. 2006. Perencanaan Pembangunan Sistem Informasi. Yogyakarta : Andi.
- [14]. Stendy B. Sakur, 2003, Aplikasi Web Database dengan Dreamweaver MX, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [15]. Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [16]. Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- [17]. Sunyoto, Andi. 2007. Ajax Membangun Web dengan Teknologi Asynchronous Javascript & XML. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- [18]. Wicaksono, Yogi. 2008. Membangun Bisnis Online dengan Mambo. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- [19]. Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.